

## Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGS 1)

Sri Puspita Wulandari<sup>1\*</sup>, Andi Puput Febrianti Syahid<sup>2</sup>, Jamaluddin<sup>3</sup>, Muhammad Ansar<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Tadulako

\*E-mail: sripuspitawulandaryy@mail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 29-05-2026*

*Revision: 08-06-2026*

*Published: 14-06-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap *Sustainable Development Goals* 1. SPIP sebagai kerangka pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, APIP sebagai aparatur pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Penelitian ini menggunakan data skunder dari Pemerintah Daerah di Sulawesi selama tahun 2018-2024 dengan jumlah sampel akhir sebanyak 834 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berpengaruh negatif terhadap *Sustainable Development Goals*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pencapaian SDG's 1. Oleh karena itu, penguatan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

### A B S T R A C T

*This study aims to analyze the effect of the maturity of the Government Internal Control System (SPIP) and the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on Sustainable Development Goals 1. SPIP, as an internal control framework, functions to ensure that the management of state resources is carried out efficiently, effectively, and in accordance with applicable regulations. On the other hand, APIP, as a supervisory apparatus, has an important role in ensuring that the implementation of government policies and programs runs in accordance with established objectives, as well as detecting and preventing irregularities. This study uses secondary data from Local Governments in Sulawesi during the period 2018–2024, with a final sample of 834 observations. The results of this study indicate that the maturity of the Government Internal Control*

### Acknowledgment

---

*System (SPIP) and the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) have a negative effect on Sustainable Development Goals. These findings indicate that improvements in SPIP maturity and APIP capability have not been fully accompanied by improvements in the achievement of SDGs 1. Therefore, strengthening SPIP and enhancing APIP capability need to be directed not only toward fulfilling administrative aspects, but also toward improving the effectiveness of poverty alleviation programs, the accuracy of policy targeting, the efficiency of budget utilization, and the quality of regional governance.*

**Key word:** *Maturity SPIP, Kapability APIP dan Sustainable Development Goals*

---

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam proses pembangunan (Liashenko & Dluhopolskyi, 2024). *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kerangka pembangunan global periode 2015–2030 yang mencakup 17 tujuan, 169 target, serta indikator yang saling terintegrasi. Salah satu tujuan utama dalam agenda tersebut adalah SDG 1, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh wilayah. Yang et al. (2022) menegaskan bahwa SDG 1 tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem, tetapi juga mencakup perluasan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar, serta penguatan ketahanan kelompok miskin dan rentan terhadap berbagai risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan.

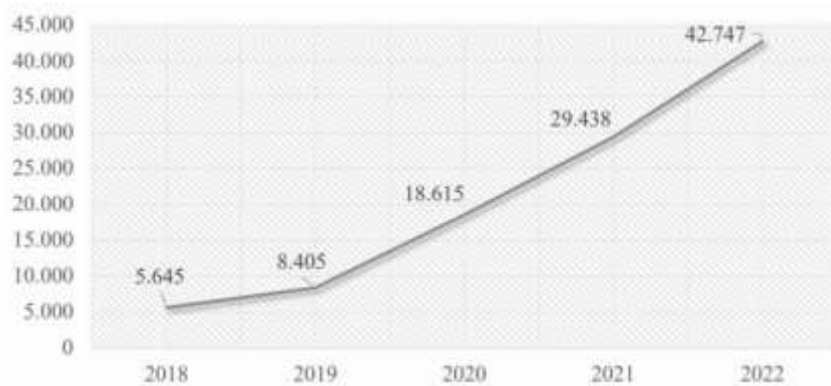
Dalam konteks Indonesia, pencapaian tujuan ini masih menghadapi tantangan yang kompleks karena kemiskinan bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, sanitasi, serta perlindungan sosial. Badan Pusat Statistik (2026) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57 persen (24,06 juta jiwa) dan menurun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Meskipun menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pencapaian SDG 1 tidak semata-mata ditentukan oleh besaran alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan (Awalia et al., 2024). Dalam konteks tersebut, menurut Indriani & Siswanto (2023) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen fundamental yang berfungsi sebagai kerangka pengendalian untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi program pengentasan kemiskinan, SPIP berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dirancang secara sistematis, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta dikendalikan berdasarkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif. Tingkat maturitas SPIP mencerminkan kapasitas organisasi pemerintah dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara optimal. Semakin tinggi tingkat maturitas SPIP, semakin besar kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi risiko, memitigasi potensi penyimpangan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Hal ini menjadi krusial mengingat program pengentasan kemiskinan memiliki kompleksitas yang tinggi dan rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran, inefisiensi belanja, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Firdauzi, et al. (2024) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang terintegrasi memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi anggaran dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Selain SPIP, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan determinan penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. APIP memiliki fungsi strategis dalam memberikan asuransi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mengawal manajemen risiko, serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja (Bua et al., 2024). Dalam konteks program pengentasan kemiskinan, APIP yang memiliki kapabilitas tinggi mampu memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Kapabilitas APIP mencerminkan kemampuan organisasi pengawasan internal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, yang mencakup kompetensi auditor, independensi, objektivitas, kualitas rekomendasi, serta dukungan kelembagaan. Namun demikian, Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa kapabilitas APIP di berbagai daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas tugas, serta dinamika kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan program publik. Lebih lanjut, Sakinah et al. (2024) menegaskan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam pengendalian korupsi dan penguatan integritas kelembagaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.



**Gambar 1. Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022**

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2022

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, secara konseptual, penelitian terdahulu cenderung mengaitkan SPIP dan APIP dengan akuntabilitas kinerja pemerintah, sementara kajian yang menghubungkan kedua variabel tersebut dengan pencapaian SDG 1 masih terbatas. Kedua, secara empiris, bukti mengenai pengaruh maturitas SPIP dan kapabilitas APIP terhadap indikator kemiskinan pada pemerintah daerah di Indonesia masih memerlukan pengujian yang lebih komprehensif. Ketiga, dari perspektif outcome, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak seharusnya hanya diukur melalui kualitas pelaporan administratif, tetapi juga melalui dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, dari perspektif kebijakan, penguatan SPIP dan kapabilitas APIP belum banyak diposisikan sebagai instrumen strategis dalam percepatan pencapaian SDG 1. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* 1, serta memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur tata kelola pemerintahan dan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemerintah daerah di Indonesia khususnya di bagian pulau sulawesi sebanyak 86 kabupaten dan 8 kota pada tahun 2018-2024 yang bersumber dari Laporan Kinerja BPKP dan website departemen urusan ekonomi dan sosial pembangunan berkelanjutan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Sampel**

KRITERIA SAMPEL	JUMLAH
Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,	48

<b>KRITERIA SAMPEL</b>	<b>JUMLAH</b>
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo	
Pemerintah daerah yang tidak dinilai implementasi SDG's tahun 2018-2024	(28)
Pemerintah daerah yang tidak memiliki Maturitas SPIP 2018-2024	(10)
Sampel Penelitian	48
Jumlah Tahun Pengamatan	7
<b>Total sampel selama tahun pengamatan</b>	<b>834</b>

Sumber: diolah peneliti, 2026

Penelitian ini menggunakan aplikasi WarpPLS sebagai alat analisis data karena metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang tersedia dalam WarpPLS mampu menguji hubungan kausalitas antarvariabel secara simultan, baik pada model pengukuran (*outer model*) maupun model struktural (*inner model*). WarpPLS dipilih karena memiliki kemampuan untuk menganalisis model penelitian yang kompleks dengan jumlah sampel relatif kecil hingga menengah serta tidak mensyaratkan data berdistribusi normal secara ketat. Selain itu, WarpPLS menyediakan berbagai ukuran kelayakan model (*model fit indices*), pengujian efek langsung, tidak langsung, dan moderasi, sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif. Penggunaan WarpPLS juga sesuai untuk penelitian yang berorientasi pada pengembangan teori dan prediksi hubungan antarvariabel, termasuk dalam penelitian sektor publik yang sering menghadapi keterbatasan jumlah observasi dan karakteristik data yang tidak sepenuhnya memenuhi asumsi statistik parametrik.

### Hipotesis

H1: Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh Negatif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's 1).

H2: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh negatif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's 1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Pengujian Outher Model

Pengujian outer model dengan indikator formatif dievaluasi melalui substantive contentnya, dengan membandingkan besarnya bentuk relative weight dengan melihat signifikansi dari suatu indikator konstruk tersebut. Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan melihat signifikansi weight yang didapat melalui prosedur resampling. Jika nilai weight yang dihasilkan signifikan  $P < 0.05$ , maka indikator/item tersebut memenuhi kriteria indicator reliability. Hasil pengujian terhadap data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Laten Variabel	Nilai Signifikan Weight	Kriteria	Keterangan
Maturitas SPIP (X1)	<0.001	P<0.05	Reliabel
Kapabilitas APIP (X2)	<0.001	P<0.05	Reliabel
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (Y)	<0.001	P<0.05	Reliabel

Sumber data diolah 2026

Berdasarkan hasil yang disajikan tabel 2 memberikan informasi bahwa nilai signifikansi weight untuk masing-masing variabel memiliki nilai <0.001. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria indicator reliability. Konstruk formatif merupakan hubungan regresi berganda dari indikator ke konstruk, oleh karena itu maka isu collinearity menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Cara umum yang digunakan untuk menguji collinearity yaitu dengan melihat ukuran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan lawannya *Tolerance*. Nilai *cut-off* yang dapat diterima untuk VIF <5 dan lawannya tolerance >0.20 (Latan dan Gozali, 2014). Hasil pengujian terhadap data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Uji Kolinearitas**

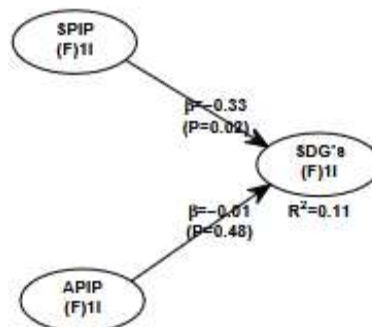
Laten variabel	Nilai VIF	Kriteria	Keterangan
Maturitas SPIP (X1)	1.118	VIF < 5	Non Collinearity
Kapabilitas APIP (X2)	1.029	VIF < 5	Non Collinearity
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	1.088	VIF < 5	Non Collinearity

Sumber: Hasil Output WarpPLS 8.0 2026

Berdasarkan hasil pada tabel 3 memberikan informasi bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel memiliki nilai <5. Dengan demikian bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria *Collinearity*.

**Pengujian Direct Effect (Inner Model)**

Hasil estimasi *direct effect* (pengaruh langsung) antara Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Inner Model**

Sumber: Hasil Output WarpPLS 8.0 2026

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa variabel Maturitas SPIP (X1) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's 1). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,33 dengan tingkat signifikansi  $P = 0,02 (< 0,05)$ . Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa maturitas SPIP berpengaruh terhadap SDG's 1 diterima.

Sementara itu, variabel Kapabilitas APIP (X2) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap SDG's 1, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar -0,01 dengan tingkat signifikansi  $P = 0,48 (> 0,05)$ . Meskipun arah hubungan bernilai negatif, namun karena tidak signifikan secara statistik, maka hubungan tersebut tidak memiliki makna empiris. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh kapabilitas APIP terhadap SDG's 1 ditolak.

Selain itu, hasil pengujian model menunjukkan bahwa nilai R-Square ( $R^2$ ) sebesar 0,11 pada variabel SDG's 1. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP secara simultan hanya mampu menjelaskan sebesar 11% variasi dalam SDG's 1, sedangkan sisanya sebesar 89% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya jelaskan model tergolong rendah.

**Tabel 4. Koefisien**

Dependen Variabel	SPIP (X1)	APIP (X2)
SDG's 1 (Y)	-0.326 P<0.002	-0.008 P<0.48

Suber: Hasil Output WarpPLS 8.0,2026

Hasil Pengujian yang telah dilakukan untuk menguji beberapa indicator model fit yang lain seperti *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), *Average adjusted R-Squared* (AARS), *Average Blok VIF* (AVIF) dan *Average blok VIF* (AVIF) di sajikan dalam tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5. Model Fit dan Quality Indices**

Parameter	Nilai	Batasan	Kesimpulan
Average path coefficient (APC)	0.168 P<0.001	P<0,05	Model Fit
Average R- squared (ARS)	0.108 P<0.001	P<0,05	Model Fit
Average adjusted R-squared (AARS)	0.041 P<0.001	P<0,05	Model Fit
Average block VIF (AVIF)	1.001	Acceptable If $\leq 5$ , Ideally $\leq 3.3$	Model Fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.078	Acceptable If $\leq 5$ , Ideally $\leq 3.3$	Model Fit
Tenenhaus GoF (GoF)	0.328	Small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$	Model Fit

Sumber: Hasil Output WarpPLS 8.0 2026

Berdasarkan hasil pengujian model fit yang disajikan pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai *Average Path Coefficient* (APC) sebesar 0,168 dengan tingkat signifikansi  $P < 0,001$ , nilai *Average R-*

*Squared* (ARS) sebesar 0,108 dengan tingkat signifikansi  $P < 0,001$ , serta nilai *Average Adjusted R-Squared* (AARS) sebesar 0,041 dengan tingkat signifikansi  $P < 0,001$ . Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Average Block Variance Inflation Factor* (AVIF) sebesar 1,001 dan nilai *Average Full Collinearity Variance Inflation Factor* (AFVIF) sebesar 1,078.

Selain itu, nilai *Tenenhaus Goodness of Fit* (GoF) sebesar 0,328 menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian model berada pada kategori medium. Hal ini didasarkan pada kriteria penilaian GoF, yaitu nilai  $\geq 0,10$  termasuk kategori small, nilai  $\geq 0,25$  termasuk kategori medium, dan nilai  $\geq 0,36$  termasuk kategori large (Tenenhaus et al., 2005; Latan & Ghozali, 2016).

### Koefisien Determinasi

**Tabel 6. Koefisien Determinasi**

	R Square	R-Square Adjusted	Q-Squared
SDG's (Y)	0.108	0.041	0.173

Sumber: Hasil Output WarpPLS 8.0,2026

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 6, diketahui bahwa nilai R-Square pada variabel *Sustainable Development Goals 1* (Y) adalah sebesar 0,108. Selanjutnya, nilai R-Square Adjusted sebesar 0,041 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel prediktor dalam model, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel *Sustainable Development Goals* adalah sebesar 4,1%. Selain itu, nilai Q-Squared sebesar 0,173 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki relevansi prediktif yang memadai. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa nilai Q-Squared yang lebih besar dari nol mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi terhadap variabel endogen.

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencapaian SDG's 1, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Arah hubungan yang ditemukan mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Secara konseptual, sistem pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemerintah, sehingga alokasi dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran (Firdauzi, et al., 2024). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *Agency Theory*, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mampu memitigasi asimetri informasi dan potensi moral hazard antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Keberadaan sistem pengendalian yang memadai akan memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah serta memas-

tikan bahwa sumber daya publik dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Kharisma & Rahma, 2023). Selanjutnya, dalam kerangka teori tata kelola sektor publik, SPIP merepresentasikan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara (Erliyanti et al., 2022). Temuan ini konsisten dengan penelitian Anggi et al. (2021), Welly (2021), serta Heinrich & Probohudono (2023) yang menegaskan bahwa maturitas SPIP berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, (Filho et al., 2021b) juga menunjukkan bahwa penguatan SPIP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan melalui peningkatan kualitas tata kelola sektor publik.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak berpengaruh terhadap pencapaian SDG's 1, sehingga hipotesis kedua dinyatakan ditolak. Secara teoretis, APIP memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pengawasan, audit, dan konsultasi guna meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, pengaruh APIP terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak bersifat langsung, melainkan sangat bergantung pada efektivitas implementasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan (Filho et al., 2021b), (Prima et al., 2025). Dalam perspektif *Agency Theory*, APIP berperan sebagai mekanisme monitoring untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh komitmen organisasi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Ketika rekomendasi tidak diimplementasikan secara optimal, maka fungsi pengawasan menjadi kurang efektif dalam mendorong pencapaian outcome pembangunan (Tasik et al., 2024). Selain itu, dalam kerangka teori tata kelola sektor publik, orientasi pengawasan yang masih cenderung berbasis kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja menyebabkan kontribusi APIP terhadap pencapaian tujuan pembangunan menjadi terbatas. Di sisi lain, kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan eksternal, sehingga tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah (Tasik et al., 2024).

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi *Agency Theory* dan teori tata kelola sektor publik dalam menjelaskan hubungan antara mekanisme pengendalian, pengawasan, dan pencapaian tujuan pembangunan. SPIP sebagai instrumen pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh yang lebih langsung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta efektivitas implementasi program pemerintah, sedangkan APIP berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada kualitas implementasi rekomendasi. Dalam perspektif tata kelola, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga oleh efektivitas sistem dalam menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi antara SPIP dan APIP dalam menjelaskan pencapaian SDG's 1 yang masih relatif terbatas dalam literatur, khususnya pada konteks

pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua instrumen tata kelola memiliki tingkat pengaruh yang setara terhadap outcome pembangunan, sehingga implikasinya adalah perlunya penguatan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek pengawasan, tetapi juga pada efektivitas implementasi sistem pengendalian internal secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturitas SPIP memiliki pengaruh terhadap pencapaian SDG's 1. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan program dan anggaran, sehingga mampu mendukung penurunan tingkat kemiskinan. Secara konseptual, sistem pengendalian internal yang memadai memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program berjalan secara lebih sistematis, terarah, dan akuntabel, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran. Sebaliknya, kapabilitas APIP tidak menunjukkan pengaruh terhadap pencapaian SDG's 1.

Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal belum secara langsung berkontribusi terhadap outcome pembangunan, mengingat perannya yang bersifat tidak langsung serta sangat bergantung pada efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Secara implikatif, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan maturitas SPIP sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu menjamin efektivitas dan keberhasilan program pembangunan. Di sisi lain, peran APIP perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan independensi, serta transformasi pendekatan pengawasan dari berbasis kepatuhan menuju berbasis kinerja dan outcome, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya keterbatasan dalam pemilihan variabel penelitian yang hanya berfokus pada aspek pengendalian dan pengawasan internal pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas determinan kemiskinan sebagai indikator SDG's 1. Selain itu, penggunaan data sekunder membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual di lapangan. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang masih terbatas, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan, seperti kualitas kebijakan publik, kapasitas fiskal daerah, serta faktor sosial ekonomi masyarakat, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi

pencapaian SDG's 1. Selain itu, penggunaan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti *mixed methods*, juga direkomendasikan untuk menggali secara lebih mendalam aspek implementasi kebijakan dan efektivitas tata kelola. Perluasan cakupan objek penelitian pada berbagai tingkat pemerintahan juga penting dilakukan guna meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, Basri, Y. M., & Rofika. (2021). Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengaruh Sakd, Simda, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *15*, 1–24. <https://doi.org/10.25170/jak.v15i1.1371>
- Awalia, D., Abdullah, M., Furqan, A., & Megawati, M. (2024). International evidence: Supreme Audit Institution oversight and government governance roles in achieving Sustainable Development Goal 1. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i2.1779>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id>
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*.
- Betta, A., & Arza, F. I. (2020). *Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *8*, 24. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109152>
- Bua, M. I., Karim, F., & Megawati. (2024). The Influence of APIP Capabilities in Optimizing Financial Audit Efficiency: Optimal Accountability. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.012.120>
- Cantika, S. D. (2023). Government Efforts In Poverty Alleviation Through The *Sustainable Development Goals* (SDGs) Program. *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v3i2.2087>
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1825>
- Filho, L., Lovren, V., Will, M., Sálvia, A., & Frankenberger, F. (2021a). Poverty: A central barrier to the implementation of the UN *Sustainable Development Goals*. *Environmental Science & Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.020>
- Filho, L., Lovren, V., Will, M., Sálvia, A., & Frankenberger, F. (2021b). Poverty: A central barrier to the implementation of the UN *Sustainable Development Goals*. *Environmental Science & Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.020>
- Firdauzi, I., Arifin, A., Alfarisy, M. F., Fauzi, P., Badriah, L. S., Faizah, A., Ilma, N., Kartika, N., & Nasution, U. (2024). How Government Internal Control System Supporting Regional Development Goals: Empirical Evidence from Internal Control System in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *9*(1).

- Firdauzi, I., Arifin, A., Alfarisy, M., Fauzi, P., Badriah, L. S., Ilma, A. F. N., & Nasution, N. (2024). How government internal control system supporting regional development goals: Empirical evidence from internal control system in Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i1.17064>
- Firmansyah, A. (2025). Improving The Effectiveness Of Public Financial Supervision:: The Role Of Apip And Challenges In The Modern Era. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 7(2), 140–158.
- Galabada, J. (2021). Institutional Impact on Achieving the Sustainable Development Goal of Ending Poverty. *Asian Social Science*. <https://doi.org/10.5539/ass.v17n10p25>
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Juniati, R. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Karmanis, K., & Rofa'a, A. C. (2023). Pengaruh peran Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Dalam pelaksanaan Maturitas sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP) Inspektorat kota pekalongan. *Jurnal Media Administrasi*. <https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.478>
- Kharisma, A., & Rahma, H. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*. <https://doi.org/10.52062/jaked.v18i1.3039>
- Liashenko, O., & Dluhopolskyi, O. (2024). Uncovering the Interplay Between Social Welfare Preferences and Society 5.0 Achievement: Implications for Sustainable Development. *ECONOMICS*, 12, 175–197. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0009>
- Lii, R. A., Wokas, H., & Suwetja, I. (2025). Analisis kewenangan dan bentuk pengawasan inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*. <https://doi.org/10.58784/rapi.370>
- Lubis, S. S., & Bahmid, B. (2024). Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan). *Legalitas: Jurnal Hukum*.
- Manggarani, Y., & Yudyanto, Y. (2023). Menelisik Peran Auditor Internal Pemerintah Saat Ini Berdasarkan Penilaian Internal Audit Capability Model (IACM). *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i01.p09>
- Mukhlis, M., Sumirah, S., & Prahesta, A. L. (2021). *Evaluation on Maturity Assessment System of Government Internal Control System (SPIP) in Local Government*.
- Osipova, E. (2015). Establishing Cooperative Relationships and Joint Risk Management in Construction Projects: *Agency Theory Perspective*. *Journal of Management in Engineering*, 31, 5014026. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000346](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000346)
- Ostensio, G., Din, M., Masruddin, M., & Tanra, A. A. M. (2025). The Role of Government Internal

- Supervisory Apparatus (APIP) in Corruption Prevention in Local Governments Districts/Cities Central Sulawesi Province. *Journal of Tourism Economics and Policy*. <https://doi.org/10.38142/jtep.v5i3.1410>
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2016).
- Prima, A., Ritonga, S., & Jamaluddin, Y. (2025). Analysis of the Effectiveness of the Performance of the Government's Internal Supervisory Apparatus in the Field of Performance and Financial Supervision at the Inspectorate Mandailing Natal Regency. *Journal of Public Representative and Society Provision*. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.613>
- Sakinah, H., Furqan, A. C., & Meldawati, L. (2024). Achieving the SDGs through strengthening the capabilities of APIP and corruption control in Indonesia. *Riau International Conference on Economics, Business and Accounting*, 1(1, Januari), 185–195.
- Someshwara, P. (2025). The Fundamental Role of Poverty Eradication in the Sustainable Development Goals. *GLS KALP: Journal of Multidisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.69974/glskalp.05.02.05>
- Swastika, I., & Widhiyani, N. (2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p02>
- Tasik, P., Remmang, H., & Faridah, F. (2024). Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*.
- United Nations. (2015). *The 17 goals. Sustainable Development Goals*. Retrieved June 8, 2026, from
- Utami, B. P., & Widarjo, W. (2022). Quality of Public Services in Local Governments in Indonesia : A Study of Capital Expenditures and Government Internal Control Systems. *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i9-12>
- Welly, W. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5600>
- Yang, D., Luan, W., Yang, J., Xue, B., Zhang, X., Wang, H., & Pian, F. (2022). The contribution of data-driven poverty alleviation funds in achieving mid-21st-Century multidimensional poverty alleviation planning. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01180-x>
- Zahari, A. I. (2023). Evaluation of the Internal Control Systems in the Malaysian Public Sector. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Zhou, X. (2023). Principal-agent Relationship and Agency Problem. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/34/20231678>